

**TESIS**

**ANALISIS DETERMINAN ANGKA KEMISKINAN  
DI KABUPATEN MAMASA**

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan  
Dalam mencapai Gelar Magister S2**

**Konsentrasi :  
Perencanaan Kependudukan dan SDM**



**Oleh :  
DAUD TANDI ARRUAN  
P. 0306210514**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TESIS**

**ANALISIS DETERMINAN ANGKA KEMISKINAN  
DI KABUPATEN MAMASA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DAUD TANDI ARRUAN**

**Nomor Pokok P. 0306210514**

**telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 6 Mei 2013  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Menyetujui  
Komisi Penasihat,**

---

**Dr. H. Madris, DPS, M.Si.**

**Ketua**

**Ketua Program Studi  
Pengelolaan Lingkungan Hidup,**

---

**Dr. Syaefullah Cangara, M.Si.**

**Anggota**

**Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin,**

---

**Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc.**

---

**Prof. Dr. Ir. Mursalim.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Daud Tandi Arruan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **P. 0306210514**

Program Studi : **Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2013

Yang menyatakan

**Daud Tandi Arruan**

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan Berkah dan Karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Gagasan yang melatar belakangi tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Mamasa semenjak pemekaran wilayah di tahun 2002 lalu. Banyak faktor yang penulis lihat sebagai penyebab masih tingginya angka kemiskinan tersebut diantaranya sumber daya manusia dari masyarakat Mamasa yang masih rendah sampai saat ini serta laju inflasi yang masih tinggi sehingga menurunkan daya beli masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui apa pengaruh dari faktor jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi terhadap angka kemiskinan di kabupaten Mamasa, dan membuat pengaruhnya dalam suatu model matematis. Untuk itu penulis bermaksud dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mamasa. Harapan penulis agar supaya nantinya pemerintah Kabupaten dan Propinsi beserta masyarakat dan pelaku usaha (swasta) dapat bahu-membahu dan saling mendukung dalam pengentasan angka kemiskinan ini.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini. Tesis ini merupakan wujud nyata dari peran penasehat yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Untuk itu melalui

kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Madris., DPS., M.Si dan Bapak Dr. Syaefullah Cangara., M.Si yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih dan apresiasi juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Sulaiman Asang., MS, Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi., SU dan Bapak Dr. Paulus Uppun., MA sebagai tim penilai atas masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga bimbingan dan arahan yang telah Bapak-bapak berikan kepada kami menjadi budi baik dan mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu staf Dosen serta pegawai administrasi dan rekan-rekan mahasiswa pada Program Magister Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin atas ilmu dan bantuannya selama ini.

Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada Orang tua, Istri dan anak-anakku tercinta serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan moriil dalam menjalani dan menyelesaikan studi ini.

Makassar, April 2013

Daud Tandi Arruan

## ABSTRAK

**Daud Tandi Arruan.** Analisis Determinan Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamasa (dibimbing oleh H. Madris dan Syaefullah Cangara)

Fenomena yang dialami di Kabupaten Mamasa yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang masih banyak. Namun keadaan yang sekarang ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi justru memberikan sinyal kedekatan dengan indikator-indikator kemiskinan yang meningkat. Dilihat dari dampak desentralisasi pun, perbaikan dan peluang ini belum dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamasa. Metode analisis yang digunakan adalah model Regresi Linier Berganda menggunakan data time series selama 10 tahun (2002 – 2011)

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap Angka kemiskinan, hanya inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamasa.

Kata Kunci : Angka Kemiskinan.

**ABSTRACT**

**Daud Tandj Arruan, Analysis of Poverty Rate Determinants in the Mamasa Regency  
(Supervised by H. Madris and Syaefullah Cangara)**

Phenomenon experienced in the Mamasa Regency the number and percentage of poor people is still a lot. But the current situation shows that the conditions for economic growth gave a signal closeness with poverty indicators on the rise. Judging from the impact of decentralization, improvements and opportunities can not be enjoyed by all people.

This study aimed to determine the effect of population, Gross Domestic Product (GDP), inflation and investment against Poverty in Mamasa Regency. Analytical methods used are Regression models using time series data for 10 years (2002-2011)

The analysis showed that the total population, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and investment no significant effect on the poverty rate, inflation is only positive and significant effect on poverty rate in the Mamasa Regency.

Keywords: Poverty.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	iii
<b>PRAKATA</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	vi
<b>ABSTRACT</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiii

**BAB. I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	6

**BAB. II TINJAUAN TEORITIS**

A. Kemiskinan .....	7
1. Definisi Kemiskinan .....	7
2. Indikator Kemiskinan .....	11
3. Penyebab Kemiskinan .....	13
4. Penduduk dan Kemiskinan .....	20



B. Investasi .....	23
C. Inflasi .....	28
1. Efek Terhadap Pendapatan ( <i>Equity Effect</i> ) .....	29
2. Efek Terhadap Efisiensi ( <i>Efficiency Effects</i> ) .....	29
3. Efek Terhadap Output ( <i>Output Effects</i> ) .....	30
D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	32
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	32
2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) .....	33
E. Penelitian Terdahulu .....	42
F. Kerangka Konseptual .....	48
G. Hipotesis Penelitian .....	49

### **BAB. III METODE PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Penelitian .....	50
B. Jenis dan Sumber Data .....	50
C. Model Estimasi .....	50
D. Analisis Data .....	51
1. Uji validasi model (F-test).....	51
2. Uji Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat melalui uji signifikansi koefisien regresi (t-Test).....	52
E. Definisi Operasional Variabel .....	52

## BAB. IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian / Gambaran Umum Kabupaten Mamasa.....	54
1. Letak Geografis.....	54
2. Penduduk dan Tenaga Kerja.....	56
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	57
1. Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamasa .....	57
2. Perkembangan Investasi di Kabupaten Mamasa.....	60
3. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Mamasa.....	62
4. Perkembangan Penduduk di Kabupaten Mamasa .....	63
5. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Mamasa .....	65
C. Analisis Regresi Linier Berganda .....	68
D. Pengujian Model .....	68
1. Uji validasi model (F-test).....	68
2. Uji Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat melalui uji signifikansi koefisien regresi (t-Test).....	69
E. Interpretasi Model .....	69
1. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) dan Investasi.....	70
2. Pengaruh Inflasi .....	74

**BAB. V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xiv
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	Lampiran - lampiran
-----------------------	---------------------

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	: Kerangka Konseptual	48
Gambar 2	: Angka Kemiskinan Mamasa Periode 2002-2011	60
Gambar 3	: Perkembangan Investasi Kabupaten Mamasa Periode 2002-2011	61
Gambar 4	: Perkembangan Inflasi Kabupaten Mamasa 2002-2011	63
Gambar 5	: Perkembangan Penduduk Mamasa 2002-2011	64
Gambar 6	: Perkembangan PDRB Kabupaten Mamasa Berdasarkan Harga Berlaku Periode 2002-2011	67

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011	55
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor di Kabupaten Mamasa Tahun 2011	57
Tabel 3	: Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Mamasa Periode 2002-2011	59
Tabel 4	: Perkembangan Investasi Kabupaten Mamasa	61
Tabel 5	: Perkembangan Inflasi Kabupaten Mamasa 2002-2011	62
Tabel 6	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Mamasa 2002-2011	64
Tabel 7	: Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Mamasa 2002-2011	66
Tabel 8	: Hasil evaluasi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan investasi terhadap angka kemiskinan	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai Nation State, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, hak rakyat untuk berinovasi,

hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 18,2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan.

Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun sekitar 40% dari total penduduk menjadi sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta prasarana pendukungnya.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga



kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan antara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari tahun 1999-2011.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, (2) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan dan gizi), (3) pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta (4) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Fenomena yang dialami di Kabupaten Mamasa yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang masih banyak. Namun keadaan yang sekarang ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi justru memberikan sinyal kedekatan dengan indikator-indikator kemiskinan yang meningkat. Dilihat dari dampak desentralisasi pun, perbaikan dan peluang ini belum dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan data resmi kemiskinan menunjukkan adanya stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum era desentralisasi. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah memang terlihat di tingkat kampung, tetapi program ini sering tidak memenuhi harapan pejabat pemerintah daerah dan warga karena lemahnya implementasi dan mekanisme kontrol.

Penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dinilai sangat menghambat kinerja ekonomi suatu daerah sedangkan bila kinerja ekonomi mengalami tren yang positif, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan indikasi berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pendidikan, angkatan kerja, kesehatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mamasa perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa ?
2. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa ?
4. Apakah investasi berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa.
2. Mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa.
4. Mengetahui pengaruh investasi terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam merumuskan dan merencanakan program yang tepat bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Mamasa.
2. Dapat memberikan alternatif dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Kemiskinan**

##### **1. Definisi Kemiskinan**

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya factor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indicator kemiskinan Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

##### **a. Kemiskinan absolute**

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum

yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- i. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
- ii. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,
- iii. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya,
- iv. Perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
- v. Perbedaan struktur industri,

- vi. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik Negara lain dan perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. *Pertama*, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri *kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak

guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin.

Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni: *anonimitas*, *independensi*, maksudnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip *monotonisitas*, yakni bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada dibawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. Prinsip *sensitivitas distribusional* menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika anda mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin.

Dua indeks kemiskinan yang sangat sering digunakan karena memenuhi empat kriteria tersebut adalah *Indeks Send* dan *Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT)* (*P alpa*). UNDP selain mengukur kemiskinan dengan parameter pendapatan pada tahun 1997 memperkenalkan apa yang disebut Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) (*Human Poverty Indeks-HPI*) atau biasa juga disebut Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks-HDI*), yakni bahwa kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*theree key deprivations*), yaitu kehidupan, pendidikan dan ketetapan ekonomi.



## 2. Indikator Kemiskinan

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006).

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. semenjak itu setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari.

Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan (BPS, 2007). Analisis faktor-faktor yang

menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999). Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif (*physical productive capital*), status pekerjaan, dan karakteristik desa.

Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian.

Kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Anggota rumah tangga yang tidak memiliki modal fisik terpaksa menerima pekerjaan dengan bayaran yang rendah dan tidak mempunyai alternatif untuk berusaha sendiri. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga. World Bank (2002)

mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu.

Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

### **3. Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan :

Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

- a. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- b. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- c. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- d. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Kemiskinan tidak hanya menyangkut tentang pendapatan tetapi juga menyangkut tentang aspek kehidupan lainnya. Kemiskinan di berbagai hal ini disebut dengan kemiskinan plural.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Mencari atau meneliti tentang penyebab miskin tidak mudah. Berbagai penelitian dan seminar telah dilakukan dalam upaya meneliti, membahas dan mengevaluasi serta mencarikan langkah-langkah pemecahannya. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ahli dan lembaga tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada.

Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut.

**Todaro (2006)** memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja,

tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita.

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.

Secara lebih khusus negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand menemukan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Produktivitas tenaga kerja yang rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal jika dibanding dengan tenaga kerja, tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah.

**Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995)** yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.

2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Selain itu kemiskinan dapat terjadi akibat sistem ekonomi yang berlaku karena yang kuat menindas yang lemah, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai bagi golongan yang bersangkutan, struktur pemilikan, dan penggunaan tanah, pola usaha yang terbelakang, dan pendidikan angkatan kerja yang rendah.

Dengan rendahnya faktor-faktor diatas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

Untuk kasus Indonesia diperkirakan ada empat faktor penyebab kemiskinan. Faktor tersebut yaitu: rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan,

terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian.

**Asnawi (1994)** menyatakan suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor teknologi. Sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, keterampilan pekerjaan, dan semuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri, kalau sosial budaya masyarakatnya masih terbelakang maka rendahlah mutu sumber daya manusianya. Sebaliknya kalau sosial budaya modern sesuai dengan tuntutan pembangunan maka tinggilah mutu sumber daya manusia tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa potensi suatu wilayah ditentukan oleh keadaan fisik, sarana dan prasarana, iklim, keseluruhan lahan atau keadaan air, keadaan topografi dan sarana seperti irigasi, jalan transportasi, pasar, kesehatan (sanitasi), pendidikan, gudang, fasilitas pengolahan, kondisi pertanian, kondisi pertanian, lembaga keuangan dan perbankan dan lain-lain.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada 2 (dua) faktor utama yaitu :

1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan
2. Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah (Daulay, 2009).



Menurut **Ginanjar (1996)** ada 4 faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Rendahnya taraf pendidikan.
- b. Rendahnya taraf kesehatan.
- c. Terbatasnya lapangan kerja.
- d. Kondisi keterisolasian.

Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjat dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan pangkal.

**Pendapat Ginanjar (1996)** bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Sumber daya alam yang rendah.
- b. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.
- c. Sumber daya manusia yang rendah.
- d. Saran dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima yang pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

#### 4. Penduduk dan Kemiskinan

Salah satu penghambat pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan yang sekaligus merupakan ciri negara-negara tersebut ialah adanya ledakan penduduk. Telah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan, yang biasa diukur dengan kenaikan penghasilan riil perkapita. Penghasilan riil per kapita adalah sama dengan pendapatan nasional riil atau output secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya. Jadi standar hidup tidak dapat dinaikkan kecuali jika *output* meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk.

Untuk mempengaruhi perkembangan *output* total diperlukan penambahan investasi yang cukup besar agar dapat menyerap tenaga kerja, menurunkan pertumbuhan penduduk; yang berarti naiknya penghasilan riil per kapita. Ada teori-teori yang memperbincangkan mengenai berapa jumlah penduduk yang seharusnya atau yang cocok bagi suatu negara. Untuk itu ada teori penduduk yang dikenal dengan "teori penduduk optimum" (*optimum population theory*). Adapun yang dimaksud dengan penduduk optimum ialah jumlah penduduk yang dapat memberikan/menghasilkan tingkat upah riil atau tingkat penghasilan riil per kapita yang maksimum.

Menurut **Malthus dalam Todaro (Todaro, 2000)**, penambahan jumlah

penduduk adalah seperti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, ...), sedangkan pertambahan jumlah produksi makanan adalah bagaikan deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...). Hal ini tentu saja akan sangat mengkhawatirkan di masa depan di mana kita akan kekurangan stok bahan makanan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk menurut Todaro,2000), yaitu :

- a. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran.
- b. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk :

- a. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.
- b. Peningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.

- c. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
- d. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.

Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu bertambah atau berkurang. Menurut Todaro (2000), dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu:

- a. Kelahiran (natalitas)
- b. Kematian (mortalitas)
- c. Migrasi (perpindahan)

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan; misalnya, Badan pusat statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Lembaga-lembaga internasional, seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) juga memperhatikan isu pengembangan

manusia, yang didefinisikan sebagai harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan tingkat daya beli per kapita.

Konsep-konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah, model-model tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

- a. Tidak menggambarkan ciri khas lokal (misalnya, kondisi perumahan atau preferensi makanan setempat).
- b. Tidak menyentuh konteks kemiskinan (misalnya, tidak ada dari model tersebut yang berhubungan dengan sumber daya alam atau konteks sosial)
- c. Data yang ada sering kontradiktif.
- d. Tidak terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perencanaan pembangunan.

## **B. Investasi**

Ciri negara berkembang adalah kurangnya modal, tidak adanya persediaan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah serta keterbelakangan teknologi. Hal ini dapat di lihat dari biaya rata-rata yang produksi yang tinggi namun produktivitas tenaga kerja rendah karena tenaga kerjanya tidak terampil dan peralatan modal yang masih sederhana, hal ini jelas dari rasio *output* modal yang tinggi, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang juga tidak lepas dari masalah di atas,

oleh karena itu investasi merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan. Contoh investasinya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang dibiayai pemerintah dan Penanaman Modal Asing. Pembentukan modal diperdagangkan sebagai salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Proses pertumbuhan modal terjadi melalui tiga tahapan, yaitu (Jhinghan,2006).

- a. Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan menabung.
- b. Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalang dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan.
- c. Penggunaan tabungan untuk investasi. Dengan rasio modal output tertentu pembentukan modal dapat menaikkan output yang berdampak pada surplus investasi sehingga pendapatan meningkat. Akhirnya masalah disalurkan pada jalur yang paling produktif.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah harapan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari, hal ini berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan yang di ambil oleh individu perusahaan dalam memutuskan apakah membeli atau tidak membeli barang- barang atau jasa-jasa adalah harapan dikemudian hari nanti dapat memperoleh keuntungan dari penjualan atau penggunaan barang dan jasa untuk proses produksi. Harapan akan keuntungan inilah yang merupakan faktor utama

dalam memutuskan apakah berinvestasi atau tidak. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal menurut Sukirno (2000) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat".

Menurut Tambunan (2001): Di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (domestic fixed capital formation). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).

Menurut definisi dari **Badan Pusat Statistik (BPS,2012)**, pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan, atau pembelian barang-barang modal baru (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun import, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik). Nopirin (2000) "Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB".

Tingkat bunga dapat mempengaruhi para pengusaha dalam memutuskan apakah harus melaksanakan investasi yang direncanakan atau membatalkannya. Maka tingkat bunga dapatlah digolongkan sebagai salah satu faktor penting yang akan menentukan besarnya investasi yang akan dilakukan para pengusaha dalam suatu tahun tertentu. Bahkan, seperti akan diterangkan dalam bahagian ini, tingkat

bunga merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan para pengusaha pada suatu waktu tertentu.

**Tambunan (2001)**, faktor yang dipertimbangkan dalam memilih investasi diantaranya adalah

- a. Modal. Yang dimaksud dengan modal adalah berapa banyak dana yang kita perlukan untuk bisa melakukan investasi sampai kita dapat memperoleh keuntungan yang melebihi dari investasi yang kita keluarkan? Prinsipnya, semakin kecil modal yang diperlukan semakin baik bagi investor.
- b. Tingkat Pengembalian. Tingkat pengembalian adalah berupa berapa persen keuntungan yang bisa diperoleh dari modal yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pengembalian dan semakin cepat jangka waktunya semakin baik bagi investor.
- c. Tingkat Risiko. Risiko adalah berapa besar kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat mengurangi jumlah modal kita dan bahkan menghabiskan modal kita. Semakin kecil tingkat risikonya, semakin baik bagi investor.
- d. Arus Dana. Terakhir adalah arus dana yang berupa seberapa cepat dana dalam bentuk Uang kas secara fisik dapat kita tarik dari modal yang telah kita setor. Semakin cepat semakin baik bagi investor.

Menurut Nopirin (2000): “Faktor yang mempengaruhi investasi adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan perpajakan serta perkiraan tentang penjualan dan kebijaksanaan ekonomi”.



Kegiatan para pengusaha untuk menggunakan teknologi yang baru dikembangkan di dalam kegiatan produksi atau usaha-usaha lain mereka dinamakan mengadakan pembaharuan atau inovasi. Pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Untuk melaksanakan perubahan-perubahan, para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru, dan ada kalanya juga harus mendirikan bangunan-bangunan pabrik/industri yang baru. Maka makin banyak perubahan atau pembaharuan yang dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai.

Di samping oleh tingkat pendapatan nasional yang dicapai, besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha ditentukan pula oleh tingkat perubahan-perubahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Para pengusaha melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk memenuhi permintaan atas barang-barang yang mereka produksi. Makin cepat perkembangan permintaan atas barang-barang yang mereka produksi, makin banyak penambahan produksi yang mereka lakukan.

Keuntungan menimbulkan suatu pengaruh lain atas investasi. Keuntungan yang tinggi merupakan suatu petunjuk bahwa perusahaan itu sedang menghadapi perkembangan dalam permintaan atas barang yang diproduksinya. Agar permintaan yang berkembang ini dapat dipenuhi di masa-masa yang akan datang, perusahaan itu harus lebih dikembangkan lagi. Maka investasi baru harus segera dilakukan.

### **C. Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa Pohan (2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000). Atau dapat dikatakan, kenaikan harga barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi.

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan equity effect, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan efficiency dan output effects (Nopirin, 2000).

### **1. Efek Terhadap Pendapatan (Equity Effect).**

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

### **2. Efek Terhadap Efisiensi (Efficiency Effects).**

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

#### **i. Efek Terhadap Output (Output Effects).**

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului

kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (2001), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (tight money policy). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan perusahaan naik. Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi (Hiper Inflasi) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yaitu penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunya produksi barang. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output. Tetapi dalam keadaan yang pernah terjadi biasanya nilai inflasi lebih besar akan menaikkan output, dan itu akan membuat pengusaha atau perusahaan untuk berinvestasi atau menanamkan modal mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan investor tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan harga tersebut.

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif (Greene dan Pillanueva, 2001).

#### **D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu daerah. Perhitungan pendapatan nasional ini

mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu daerah. Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan daerahnya sebagai gambaran, Bank Dunia menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang melalui pengelompokan besarnya PDRB, dan PDRB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Herlambang, 2001).

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1995). Sedangkan menurut Tarigan (2004), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah :

#### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## 2. **Produk Domestik Regional Netto (PDRN)**

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan yang lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan. Tetapi bila PDRN di atas dikurangi dengan pajak tidak langsung netto, maka akan diperoleh PDRN atas dasar biaya faktor.

Ada tiga pendekatan untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan metode langsung (Tarigan, 2004), yaitu:

### a. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah cara penentuan pendapatan regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan atau produksi barang dan jasa itu digunakan untuk: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung; konsumsi pemerintah; pembentukan modal tetap bruto (investasi); perubahan stok, dan ekspor netto (total ekspor dikurangi dengan total impor).

### b. Pendekatan Produksi

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Maka itu, untuk menghitung pendapatan

regional berdasarkan pendekatan produksi, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor.

c. Pendekatan Penerimaan

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Jadi yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung netto. Ada beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional yang akan disajikan, khususnya teori-teori yang sangat terkait dengan penelitian ini, diantaranya: (1) Teori Pertumbuhan Jalur Cepat; (2) Teori Basis Ekspor; (3) Model Interregional; dan (4) Teori Pusat Pertumbuhan (Aziz, 2001).

1. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Pada intinya, teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar



daerah atau luar negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor- sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

## 2. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan) atau lebih sering disebut sektor nonbasis. Pada intinya, kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah (atau mendatangkan dari luar daerah) disebut kegiatan basis. Sedangkan kegiatan non-basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun asal uangnya dari daerah itu sendiri.

Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi, yaitu: (1) asumsi pokok atau yang utama bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (independen) dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terikat (dependen) terhadap pendapatan. Secara tidak langsung hal ini berarti diluar pertambahan alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi satu-satunya yang bisa meningkat secara bebas adalah ekspor. Ekspor tidak terikat dalam siklus pendapatan daerah; (2) asumsi kedua adalah

fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan.

Model teori basis ini adalah sederhana, sehingga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Richardson besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah maka eksportnya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan.
- b. Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti: pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- c. Dalam melakukan studi atas satu wilayah, multiplier basis yang dioperasikan adalah rata-ratanya dan bukan perubahannya. Menggunakan multiplier basis rata-rata untuk proyeksi seringkali memberikan hasil yang keliru apabila ada tendensi perubahan nilai multiplier dari tahun ke tahun.
- d. Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi maka masalah time lag (masa tenggang) harus diperhatikan. Ada kasus di mana suatu daerah yang tetap berkembang pesat meski eksportnya relatif kecil. Pada umumnya hal ini dapat terjadi pada daerah yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling membutuhkan dari produk kegiatan lainnya. Pada daerah ini tetap tercipta pasar yang tertutup tetapi dinamis, dan ini bisa terjadi apabila syarat-syarat keseimbangan yang dituntut dalam teori Harrod-Domar dapat dipenuhi.

### 3. Model Pertumbuhan Interregional

Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor- faktor yang bersifat eksogen. Berbeda dengan model basis ekspor yang hanya membahas pertumbuhan daerahnya sendiri tanpa melihat dampaknya pada daerah yang ada disekitarnya. Model pertumbuhan interregional ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya model ini dinamakan model interregional. Dalam model ini, pengeluaran pemerintah dan investasi termasuk variabel bersifat eksogen sebagaimana variabel ekspor.

Dalam model pertumbuhan interregional ini, sumber-sumber perubahan pendapatan regional dapat berasal dari :

- a. Perubahan pengeluaran otonom regional, seperti: investasi dan pengeluaran pemerintah.
- b. Perubahan pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu system yang akan terlihat dari perubahan ekspor.
- c. Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model (hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional, atau tingkat pajak marjinal).

Menurut Cann, multiplier regional sangat tergantung pada nilai marginal propensity to consume locally produced goods (c-m). Apabila (c-m) meningkat nilai multiplier regional juga meningkat sebaliknya bila (c-m) menurun maka multiplier regional akan menurun juga

#### 4. Teori Pusat Pertumbuhan (The Growth Pole Theory)

Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti: kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat permukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan: daerah pedalaman, wilayah belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan, 2004).

Keuntungan bertempat di daerah terkonsentrasi adalah terciptanya skala ekonomis (economies of scale) dan economies of agglomeration (economies of localization). Dikatakan economies of scale, karena dalam berproduksi sudah berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi lebih efisien. Economies of agglomeration adalah keuntungan karena ditempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti : jasa, perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya.

Tarigan, 2004, menjelaskan pula hubungan yang terjadi antara daerah yang lebih maju (sebut saja dengan istilah kota) dengan daerah lain yang lebih terbelakang, sebagai berikut :

1. Generatif : yaitu hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya.

2. Parasitif: yaitu hubungan yang terjadi di mana daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya.

3. Enclave (tertutup) : di mana daerah kota (daerah yang lebih maju) seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang.

Selanjutnya, suatu daerah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri (Tarigan, 2004), yaitu :

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi;
2. Ada efek pengganda (multiplier effect);
3. Adanya konsentrasi geografis; dan
4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah di belakangnya.

Terdapat keterkaitan yang erat antara pendapatan nasional dan investasi. Hubungan keduanya menjadi suatu sorotan para ekonom, baik dari kalangan Klasik maupun Neo Klasik. Teori pendapatan nasional Keynesian yang menggunakan pendekatan pengeluaran agregatif di mana besarnya pendapatan nasional suatu negara diukur dari komponen-komponen expenditure para pelaku ekonominya lewat anggaran-anggarannya, yaitu; sektor rumah tangga (C; consumption), perilaku usaha dan dunia usaha tercermin lewat komponen investasi yang ditanam (I), pemerintah melalui anggaran belanjanya (G) dan sektor perdagangan internasional yang tercermin lewat nilai ekspor/impornya.

Teori di atas selanjutnya menurunkan pertimbangan parsial pada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi. Seperti halnya dalam konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, investasi oleh para pengusaha ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu diantara faktor-faktor penting yang dipertimbangkan adalah besarnya nilai pendapatan nasional yang dicapai (Sukirno, 2002).

Menurut **Tambunan, (2001)**: Ada kecenderungan, atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis, bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain pendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku dan teknologi tersedia.

**Sudono (2006)**, menyatakan dalam kebanyakan analisa mengenai penentuan pendapatan nasional pada umumnya variabel investasi yang dilakukan oleh pengusaha berbentuk investasi autonomi (besaran/nilai tertentu investasi yang selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional). Tetapi adakalanya tingkat pendapatan nasional sangat besar pengaruhnya pada tingkat investasi yang dilakukan. Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi itu akan memperbesar permintaan atas barang-barang dan jasa. Keuntungan yang dicapai oleh sektor usaha dapat mencapai targetnya, dengan demikian pada akhirnya akan mendorong dilakukan investasi-investasi baru pada sektor usaha.

Dengan demikian, apabila nilai pendapatan nasional semakin bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula. Sebaliknya semakin rendah nilai pendapatan nasional, maka nilai permintaan investasinya akan semakin rendah pula.

Pengembangan yang dilakukan para ekonom Neo Klasik pada teori Keynes ini terlihat pada formulasi yang dikembangkannya pada model akselerator investasi. Dijelaskan bahwa laju investasi adalah sebanding dengan perubahan output dalam perekonomian. Pembahasan mengenai bagaimana suatu model investasi dikembangkan, yaitu pada model investasi Neo Klasik.

Penyempurnaan yang dilakukan, yaitu menentukan suatu tingkat investasi yang diinginkan dengan memasukkan formulasi fungsi produksi Cob Douglas ke dalamnya, maka selanjutnya diperoleh fungsi investasi netto yang diinginkan dengan menyesuaikan nilai pajak yang dibebankan. Semakin tinggi produk domestik bruto maka investasi sektor pertanian akan semakin tinggi demikian sebaliknya (Sudono, 2006).

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto dapat didefinisikan menurut tiga sudut pandang yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama, yaitu:

- a. Menurut Pendekatan Produksi adalah jumlah nilai produk netto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam suatu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- b. Menurut Pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam satu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

c. Menurut pendekatan pengeluaran adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, lembaga swata tidak mencari keuntungan dan pemerintah sebagai konsumsi, pengeluaran sebagai pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor netto, di suatu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (Boediono, 2002).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Usman, Bonar M. Sinaga, dan Hermanto Siregar (2004) meneliti tentang analisis determinan kemiskinan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Penelitian ini menganalisis faktor - faktor determinan kemiskinan sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal. Studi ini menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional modul kor (Susenas kor) tahun 1999 dan tahun 2002. Selain itu, data Potensi Desa (Podes) tahun 2002 juga digunakan. Data Susenas digunakan sebagai sumber data karakteristik rumah tangga dan individu, Sedangkan data Podes sebagai sumber data variabel karakteristik komunitas dan wilayah.

Hasil pembahasan diketahui faktor determinan kemiskinan pada karakteristik rumah tangga dan Individu relatif tidak berubah. Variabel yang dapat menambah kemiskinan berturut-turut dari nilai marginal effect terbesar adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Dua variabel merupakan bidang usaha pertanian sehingga kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus. Variabel yang dapat mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga



yang bekerja, kepemilikan aset lahan pertanian, dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga.

Hermanto Siregar (2008) dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Variabel yang mempengaruhi jumlah orang miskin diduga dipengaruhi oleh pendapatan (PDRB), jumlah populasi penduduk (POPULASI), pangsa sektor pertanian dalam PDRB (AGRISHARE), pangsa sektor industri manufaktur dalam PDRB (INDUSTRISHARE), tingkat inflasi (INFLASI), jumlah orang yang lulus sekolah setingkat SMP (SMP), jumlah orang yang lulus sekolah setingkat SMA (SMA), jumlah orang yang lulus sekolah setingkat diploma (DIPLM), dan dummy krisis ekonomi (DUMMYKRISIS).

Hasil analisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa :

- a. Pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut relatif tidak besar.
- b. Inflasi maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing- masingnya relatif kecil.
- c. Peningkatan share sektor pertanian dan share sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah kemiskinan.
- d. Variabel yang signifikan dan relatif paling besar pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan ialah pendidikan. Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa :

- a. Prmasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (trickle down effect).
- b. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (necessary condition) untuk mengurangi kemiskinan. Syarat kecukupannya (sufficient condition), misalnya:
- c. Laju inflasi serta laju populasi penduduk yang terkendali.
- d. Industrialisasi pertanian/perdesaan yang tepat.
- e. Akumulasi modal manusia yang relatif cepat, harus dipenuhi pula.

Sunarwan Arif Wicaksana (2007) meneliti tentang Analisis Kesenjangan Kemiskinan Antar Propinsi di Indonesia Periode Tahun 2000-2004. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan kemiskinan spasial di Indonesia, antar pulau dan dalam pulau pada periode tahun 2000-2004. Hasil penelitian menyatakan bahwa analisis indeks entropi theil kurun waktu tahun 2000-2004, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kesenjangan kemiskinan dalam pulau tertinggi di pegang oleh kelompok pulau lainnya yang terdiri dari Propinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Hal ini disebabkan karena kelompok pulau lainnya terdapat konsentrasi persentase penduduk miskin terbanyak. Sedangkan terendah berada di Pulau Sulawesi.

- b. Kesenjangan kemiskinan antar pulau tertinggi dipegang oleh Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena terdapat konsentrasi kemiskinan terbanyak. Sedangkan terendah dipegang oleh Pulau Kalimantan.
- c. Kesenjangan kemiskinan di Indonesia relatif stabil walaupun terjadi penurunan yang relatif kecil.

Amar (1999) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat di pedesaan Asia. Faktor tersebut antara lain yaitu :

- a. Faktor ekonomi yang terdiri dari modal, tanah dan teknologi.
- b. Faktor sosial dan budaya yang terdiri dari pendidikan, budaya miskin, dan kesempatan kerja.
- c. Faktor geografis dan lingkungan.
- d. Faktor pribadi terdiri dari jenis kelamin, kesehatan dan usia.

Keempat faktor tersebut mempengaruhi aksesibilitas terhadap upaya masyarakat untuk memperoleh fasilitas umum dan kredit dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin.

Amar (1999) menyimpulkan karakteristik kemiskinan di beberapa negara Asia dan Afrika yaitu :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana akibatnya penduduk miskin cenderung tinggal didaerah kotor dan dengan penduduk yang padat.
- b. Besarnya ukuran keluarga hal ini menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat pola keluarga kecil. Besarnya jumlah anggota keluarga

menyebabkan jumlah pendapatan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin besar.

- c. Sempitnya lahan yang diindikasikan dengan sistem pengairan yang kurang baik.
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.
- e. Rendahnya mutu lingkungan hidup.
- f. Memiliki sumber nafkah utama dari pertanian.
- g. Hampir semua pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi dan rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan umum.

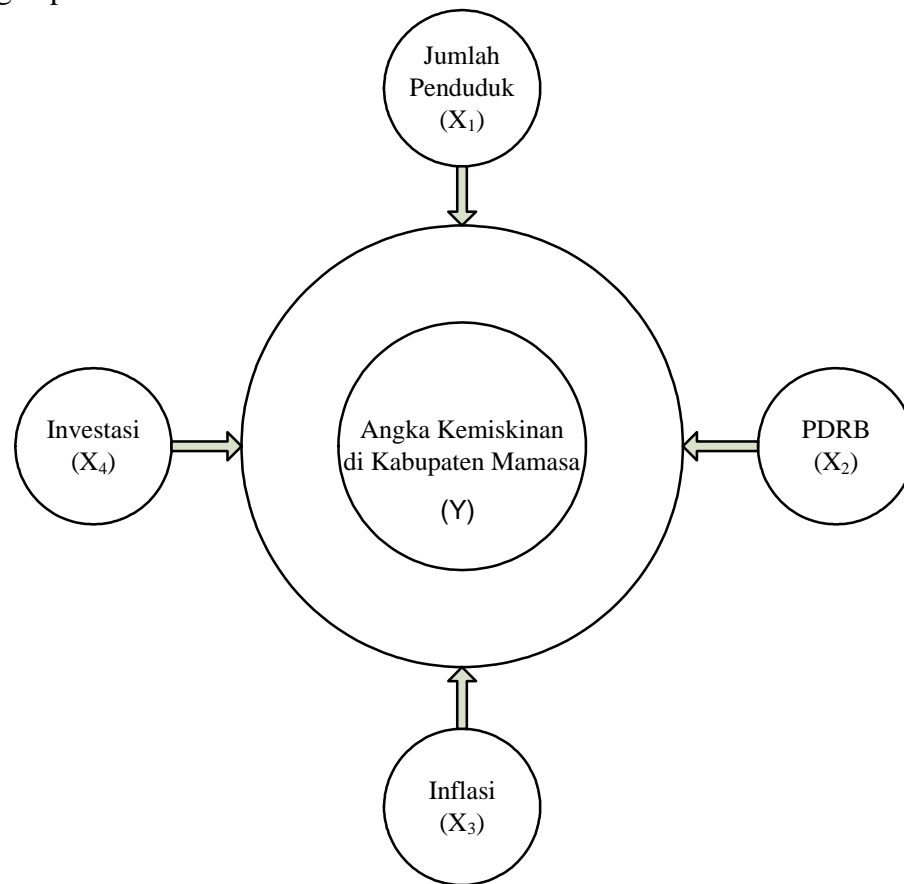
Siregar dan Wahyuniarti (2006) melaksanakan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan, faktor yang dikemukakan adalah: sumber daya manusia, PDRB, inflasi dan Jumlah Penduduk. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh pendidikan, pendapatan, dan laju inflasi yang berkembang sesuai dengan target pemerintah dapat mengurangi kemiskinan.

Novida (2006) melaksanakan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan, faktor yang dikemukakan adalah: pendapatan, tingkat pendidikan, umur, akses terhadap lembaga keuangan dan jumlah anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pendidikan dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, jika pendidikan semakin baik maka penyesuaian pekerjaan dengan pendidikan akan lebih mudah menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan dapat berkurang.

Dari uraian diatas sebab-sebab dari kemiskinan ini memang bermacam-macam. Selain itu kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Oleh karena itu faktor penyebab kemiskinan yang begitu banyak membuat masalah semakin rumit karena memerlukan kesungguhan dalam menuntaskan kemiskinan dan menemukan cara yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan disetiap daerah. Namun dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan secara objektif diharapkan ada kerja sama antara semua pihak dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Adapun faktor yang ingin dianalisis oleh peneliti adalah: Investasi, Inflasi, Jumlah Penduduk dan PDRB.

## F. Kerangka Konseptual

Dari teori yang sudah dipaparkan dan peneliti terdahulu, maka dirumuskan suatu kerangka pemikiran dalam sebuah skema/ gambar yang akan berguna untuk menjawab permasalahan secara umum serta dijadikan acuan untuk menggambarkan kerangka penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### **G. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa.